



*Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Sragen Tahun 2025*



Jl. Raya Sakowati No. 8 Sragen 57213

Telp. 0721 891432

Email: kesbangpol.sragen@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah subhanahu wata'ala Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen. Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Dengan demikian rencana kerja perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen sampai dengan bulan Juni 2025 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sragen, 24 Juli 2025

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sragen



Drs. SUTRISNA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680907 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERKENAAN	5
Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen s/d Triwulan II Tahun 2025	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Sragen	6
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Bakesbangpol Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dimana dengan adanya

recofusing anggaran untuk menunjang program pemerintah pusat yaitu program Makanan Bergizi Gratis untuk siswa pendidikan dasar SD-SMP dan SMA.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2025. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Sragen yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Renja Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 590);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025.
 9. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Sragen tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Sragen. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Bakesbangpol Kabupaten Sragen dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2025;
2. Mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta sebagai penyesuaian terhadap Renstra Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bakesbangpol Kabupaten Sragen untuk memahami arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD s/d TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Sragen Sampai Triwulan II Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Memuat tabel rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan padu indikatif tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Sesuai Rancangan Rencana Awal Renja Bakesbangpol tahun 2025 sebanyak 6 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Pada penetapan anggaran awal tahun sebesar Rp. 11.135.016.556,-

Matrik evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bakesbangpol Kabupaten Sragen sampai triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	Persentase penurunan konflik (poleksosbud yang tertangani)	Persen	17,24	0	[Pendorong] Kerjasama dengan seluruh stakeholder (Pembab, aparat keamanan, FKUB, FKDM, FKPS, Ormas dan masyarakat) yang baik dapat meminimalisir terjadinya konflik dan giat melakukan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, konflik sosial, penyuluhan terhadap ormas, penyuluhan terhadap parpol	Terus melakukan kerjasama dan koordinasi terkait kewaspadaan dini dan deteksi dini bersama aparat terkait
2	Persentase konflik SARA yang tertangani	Persen	100	100	[Pendorong] adanya kegiatan yang mendukung tercegahnya konflik SARA seperti kegiatan FKPS, FKDM dan terus bersinergi dengan aparat terkait	Terus melakukan kewaspadaan dini terkait konflik SARA dan deteksi dini bersama aparat terkait
3	Persentase konflik eksosbud yang tertangani	persen	100	100	[Pendorong] adanya kegiatan yang mendukung tercegahnya konflik eksosbud seperti sosialisasi P4GN, FPBI, FKUB dan terus bersinergi dengan aparat terkait	Terus melakukan kewaspadaan dini terkait konflik eksosbud dan deteksi dini bersama aparat terkait

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Badan Kesatuan Bangsa Politik												
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			11.135.016.556				13,25			
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11.135.016.556				13,25			
8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100,00	4.750.875.956	25,00		25,00	26,75	[TW1 - Penghambat] Kegiatan bersifat rutin, realisasi kinerja sebagian belum sesuai target dikarenakan adanya reconfusing anggaran serta belum disertai kelengkapan administrasi keuangan	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan	
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN [bulan]	12,00	4.008.571.846	3,00		25,00	29,84	[TW1 - Penghambat] Anggaran gaji diplot per semesteran (Januari dan Juli) sehingga capaian realisasi keuangan masih kecil	[TW2] Alokasi gaji sudah disesuaikan untuk antisipasi pembayaran gaji dan tunjangan di badan kesatuan bangsa dan politik dan melaksanakan pencairan sesuai kebutuhan	
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	29,00	4.008.571.846	29,00		100,00	29,84	[TW1 - Penghambat] Anggaran gaji diplot per semesteran (Januari dan Juli) sehingga capaian realisasi keuangan masih kecil	[TW2] Alokasi gaji sudah disesuaikan untuk antisipasi pembayaran gaji dan tunjangan di badan kesatuan bangsa dan politik dan melaksanakan pencairan sesuai kebutuhan	
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran [bulan]	12,00	206.057.110	3,00		25,00	4,11	[TW1 - Penghambat] Sebagian kegiatan belum terealisasi sesuai target dikarenakan adanya reconfusing anggaran	[TW2] Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya	

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	7.165.000	1,00	0	100,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum teralisasi dikarenakan adanya recofusing anggaran	[TW2] Memperiapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	45.547.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum teralisasi dikarenakan adanya recofusing anggaran	[TW2] Memperiapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya
8.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [Paket]	1,00	3.775.110	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum teralisasi dikarenakan adanya recofusing anggaran	[TW2] Memperiapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya
8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	40.410.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum teralisasi dikarenakan adanya recofusing anggaran	[TW2] Memperiapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya
8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	28.300.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum teralisasi dikarenakan adanya recofusing anggaran	[TW2] Memperiapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	12,00	80.860.000	100,00	8.466.500	833,33	10,47	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan recofusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan
8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah [Unit]	0,00	64.435.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Rencana pengadaan di TW II sehingga realisasi di TW I masih 0	[TW2] Melakukan persiapan yang diperlukan terkait pengadaan BMD di TW II
8.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan [Unit]	5,00	64.435.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Realisasi masih 0 karena direncanakan dilaksanakan di TW 2	[TW2] Memperiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan di TW 2
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	225.898.000	3,00	34.812.662	25,00	15,41	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan recofusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	36,00	72.000.000	3,00	4.689.662	8,33	6,51	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan recofusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	153.898.000	3,00	30.123.000	25,00	19,57	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan recofusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	245.914.000	3,00	31.348.739	25,00	12,75	[TW1 - Penghambat] Realisasi fisik belum diikuti dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjauan/Rekomendasi
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		
8.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	22,00	233.642.000		5,00	31.348.739		22,73	13,42	[TW1 - Penghambat] Realisasi fisik belum diikuti dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
8.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara [Unit]	23,00	12.272.000		0,00	0		0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Realisasi fisik belum diikuti dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
				Rata-rata capaian kinerja (%)			Rata-rata capaian kinerja (%)						
				Predikat kinerja			Predikat kinerja						
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan [%]	65,00	1.806.998.900		0,00	6.675.000		0,00	0,37	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan refocusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesadaran bela negara dan pembauran bangsa [%]	12,50	1.806.998.900		0,00	6.675.000		0,00	0,37	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan refocusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ)
8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan [Orang]	300,00	99.999.300		0,00	0		0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan [Orang]	4.500,00	1.706.999.600		0,00	6.675.000		0,00	0,39	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan refocusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SPJ)	[TW2] Segera melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ) dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk persiapan kegiatan di TW II, III dan IV
				Rata-rata capaian kinerja (%)			Rata-rata capaian kinerja (%)						
				Predikat kinerja			Predikat kinerja						
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik [%]	75,00	1.298.790.000		0,00	0		0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II dan III	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik [%]	23,10	1.298.790.000		0,00	0		0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II dan III	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	0	K	Rp		
8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah [Orang]	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah [Orang]	200,00	50.521.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW III	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.03.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah [Orang]	8,00	1.188.368.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah [Laporan]	8,00	59.901.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
				Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja		0,00		0,00		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			21,74	891.870.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan dilaksanakan pada TW I dan III	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas [%]	21,60	891.870.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan dilaksanakan pada TW II dan III	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.04.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah [Orang]	165,00	42.350.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW III	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
8.01.04.2.01.0004		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah [Orang]	9,00	835.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp		
8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah [Laporan]	26,00	14.520.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
Rata-rata capaian kinerja (%)													
				Predikat kinerja			SR			SR			
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa [%]	77,00	325.000.000	0,00	0,00	1.450.000	0,00	0,45	0,45	[TW1 - Penghambat] Satu sub kegiatan ditunda ke TW berikutnya dikarenakan adanya recufusing anggaran	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TW berikutnya
8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan [%]	24,60	325.000.000	0,00	0,00	1.450.000	0,00	0,45	0,45	[TW1 - Penghambat] Satu sub kegiatan ditunda ke TW berikutnya dikarenakan adanya recufusing anggaran	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TW berikutnya
8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [Orang]	100,00	50.000.000	0,00	0,00	1.450.000	0,00	2,90	2,90	[TW1 - Penghambat] Pelaksanaan kegiatan ditunda ke TW berikutnya dikarenakan adanya recufusing anggaran	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TW berikutnya
8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [Orang]	2,00	275.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	[TW1 - Pendorong] Sub kegiatan dilaksanakan pada TW II	[TW2] Melakukan segala persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
Rata-rata capaian kinerja (%)													
				Predikat kinerja			SR			SR			
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi [Kali]	5,00	2.061.481.700	0,00	0,00	196.750.000	0,00	9,54	9,54	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan recufusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SP)	[TW2] Segera melengkapi administrasi keuangan
8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase masyarakat yang paham cegah deteksi dini penanganan konflik sosial [%]	21,10	2.061.481.700	0,00	0,00	196.750.000	0,00	9,54	9,54	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan recufusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SP)	[TW2] Segera melengkapi administrasi keuangan

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	I	K	Rp		
8.01.06.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [Orang]	516,00	611.483.000	0,00	57.750.000		0,00	9,44	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan reconfusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SP)	[TW2] Segera melengkapi administrasi keuangan
8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [Orang]	276,00	1.449.998.700	0,00	139.000.000		0,00	9,59	[TW1 - Penghambat] Realisasi belum sesuai target dikarenakan harus dilakukan reconfusing anggaran dan belum disertai dengan pengadministrasian keuangan (SP)	[TW2] Segera melengkapi administrasi keuangan
				Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja						
						0,00	0,00					
						SR	SR					

Berdasarkan matrik evaluasi di atas, dapat diketahui Bakesbangpol Kabupaten Sragen sampai triwulan II dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, telah melaksanakan 21 sub kegiatan, 10 kegiatan dan 6 program. Dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.679.934.688,- (36,64%) dari Rp. 11.135.016.556,- yang dianggarkan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari anggaran Rp. 4.008.571.846,00 telah terealisasi Rp. 2.125.413.577,00 (53,02%), untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Badan Kesbangpol Kab Sragen

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dari anggaran Rp. 7.165.000,00 belum terealisasi karena proses reconfusing anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari anggaran Rp. 45.547.000,00 telah terealisasi Rp. 20.574.000,00 (64,53%), untuk untuk pengadaan ATK selama 6 bulan.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dari anggaran Rp. 3.775.110,00 belum terealisasi karena proses reconfusing anggaran.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dari anggaran Rp. 40.410.000,00 telah terealisasi Rp. 10.795.000,00 (36,29%), untuk pembelian air aqua galon dan makan minum rapat dalam 6 bulan.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dari anggaran Rp. 28.300.000,00 telah terealisasi Rp. 16.920.000,00 (85,45%), untuk kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama 6 bulan.

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari anggaran Rp. 80.860.000,00 telah terealisasi Rp. 14.891.500,00 (33,03%), untuk mencukupi kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Dari anggaran Rp. 64.435.000,00 belum terealisasi karena proses reconfusing anggaran.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Dari anggaran Rp. 72.000.000,00 telah terealisasi Rp. 4.793.344,00 (6,66%), untuk memenuhi telpon/internet.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Dari anggaran Rp. 153.898.000,00 telah terealisasi Rp. 69.197.500,00 (48,16%), untuk pembelian bahan pembersih dan pembayaran gaji tenaga kebersihan 2 orang, selama 6 bulan
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 Dari anggaran Rp. 233.642.000,00 telah terealisasi Rp. 71.304.767,00 (39,37%), untuk realisasi pembayaran pajak kendaraan roda 4 (6 unit), roda 2 (4 unit), pemeliharaan kendaraan roda 4 (5 unit) dan honor pengemudi 1 orang selama 6 bulan.
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Dari anggaran Rp. 12.272.000,00 telah terealisasi Rp. 3.800.000,00 (45,65%), untuk pemeliharaan peralatan kantor selama 6 bulan.
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 Dari anggaran Rp. 99.999.300,00 belum terealisasi karena proses reconfusing anggaran.

- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Dari anggaran Rp. 1.706.999.600,00 telah terealisasi Rp. 125.965.000,00 (9,99%), untuk kegiatan upacara hari besar nasional dalam 6 bulan dan rangkaian Hari Jadi Sragen.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Anggaran Rp. 50.521.000,00 dilaksanakan pada triwulan III.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Dari anggaran Rp. 1.188.368.000,00 belum terealisasi karena salah satu persyaratan pencairan (LHP Banpol) dari DPKP) belum turun.
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Anggaran Rp. 59.901.000,00 dilaksanakan pada triwulan III.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Anggaran Rp. 42.350.000,00 dilaksanakan pada triwulan III.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Dari anggaran Rp. 835.000.000,00 telah terealisasi Rp. 510.000.000,00 (80,31%), untuk hibah bantuan keuangan kepada Ormas PMI Sragen, Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Perkumpulan Mojo Bersatu Jaya, Persaudaraan Masyarakat Sukowati dan PSHT Cabang Sragen.
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Anggaran Rp. 14.520.000,00 dilaksanakan pada triwulan III.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dari anggaran Rp. 50.000.000,00 telah terealisasi Rp. 1.450.000,00 (2,90%), untuk belanja ATK kegiatan Pembinaan Pakem.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Anggaran Rp. 275.000.000,00 dilaksanakan pada triwulan IV.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Dari anggaran Rp. 611.483.000,00 telah terealisasi Rp. 74.263.500,00 (12,66%), untuk kegiatan FKDM.

- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Dari anggaran Rp. 1.449.998.700,00 telah terealisasi Rp. 630.566.500,00 (48,09%), untuk kegiatan pengamanan wilayah Kabupaten Sragen dalam 6 bulan.

Sedangkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen pada triwulan II dapat disampaikan sebagai berikut :

- Persentase penurunan konflik Ipoleksosbud yang tertangani masih lebih rendah dari target 37.50 %. Dimana sampai triwulan II terdapat dua potensi konflik yang terjadi yaitu rombongan Himpunan Aktifis Masyarakat (HAMAS) yang menghendaki audiensi berkaitan sikap pemerintah terhadap peredaran miras di Kabupaten Sragen dan rombongan Forum Umat Islam Sragen terkait pemberantasan dan penutupan judi sabung ayam di Desa Bener Kecamatan Ngrampal. Hal yang menjadi pendorong pemerintah dengan seluruh stakeholder (Pemkab, aparat keamanan, FKUB, FKDM, Ormas dan masyarakat) untuk terus bekerjasama guna meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat melalui kewaspadaan dini, cegah dini dan deteksi dini.

Berkaitan dengan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Bakesbangpol Kabupaten Sragen, telah dilaksanakan pemberian hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan antara lain kepada PMI Sragen, Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Perkumpulan Mojo Bersatu Jaya, Persaudaraan Masyarakat Sukowati dan PSHT Cabang Sragen.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikenal adanya program, kegiatan dan sub kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, sementara sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program dan kegiatan prioritas Bakesbangpol Tahun 2025, berisi program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Dalam DPA 2025 Bakesbangpol mempunyai 6 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Dalam perubahan 2025, disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KAB. SRAGEN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025 SEBELUM	RUPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
									APRD 2025	RUPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0.00
		BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK								10,960,664,539.00	11,135,016,556.00	10,598,117,656.00	-362,546,883.00								0.00
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								10,960,664,539.00	11,135,016,556.00	10,598,117,656.00	-362,546,883.00								0.00
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								10,960,664,539.00	11,135,016,556.00	10,598,117,656.00	-362,546,883.00								0.00
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	100 %				100 %		4,551,523,339.00	4,750,875,956.00	4,541,259,956.00	-4,551,523,339.00								0.00
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan				12 bulan		3,809,219,229.00	4,008,571,846.00	3,991,819,551.00	182,600,322.00			-	-				0.00
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan				31 Orang/ bulan		3,809,219,229.00	4,008,571,846.00	3,991,819,551.00	182,600,322.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan				12 bulan		206,057,110.00	206,057,110.00	130,349,215.00	-75,707,895.00			-	-				0.00
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				0 Paket		7,165,000.00	7,165,000.00	0.00	-7,165,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				1 Paket		45,547,000.00	45,547,000.00	31,884,000.00	-13,663,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				0 Paket		3,775,110.00	3,775,110.00	0.00	-3,775,110.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				1 Paket		40,410,000.00	40,410,000.00	30,110,000.00	-10,300,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
							8	9	10	11				12	13				14	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	28.300.000.00	28.300.000.00	22.188.000.00	-6.112.000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	80.860.000.00	80.860.000.00	46.167.215.00	-34.692.785.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			- unit	- unit	64.435.000.00	64.435.000.00	96.368.000.00	31.933.000.00			-	-	-			0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	10 Unit	64.435.000.00	64.435.000.00	96.368.000.00	31.933.000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			12 bulan	12 bulan	225.898.000.00	225.898.000.00	130.644.690.00	-95.253.310.00			-	-	-			0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	12 Laporan	72.000.000.00	72.000.000.00	5.665.190.00	-66.334.810.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	153.898.000.00	153.898.000.00	124.979.500.00	-28.918.500.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			12 bulan	12 bulan	245.914.000.00	245.914.000.00	192.078.500.00	-53.835.500.00			-	-	-			0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			22 Unit	22 Unit	233.642.000.00	233.642.000.00	183.754.500.00	-49.887.500.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			23 Unit	23 Unit	12.272.000.00	12.272.000.00	8.324.000.00	-3.948.000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRATIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/ Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	65 %	65 %	7	65 %	65 %	1,756,999,500.00	1,806,998,900.00	1,310,610,800.00	1,756,999,500.00								0.00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesadaran bela negara dan pembinaan bangsa	12.5 %	12.5 %		12.5 %	12.5 %	1,756,999,500.00	1,806,998,900.00	1,310,610,800.00	-446,388,700.00		-		Pervujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	1200 Orang		300 Orang	1200 Orang	49,999,700.00	99,999,300.00	49,951,600.00	-48,100.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pervujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4500 Orang	4500 Orang		4500 Orang	4500 Orang	1,706,999,800.00	1,706,999,600.00	1,260,659,200.00	-446,340,600.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pervujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	75 %	75 %		75 %	75 %	1,298,790,000.00	1,298,790,000.00	1,341,725,500.00	1,298,790,000.00							0.00		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelermbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	23.1 %	23.1 %		23.1 %	23.1 %	1,298,790,000.00	1,298,790,000.00	1,341,725,500.00	42,935,500.00		-	-				0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/ Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	200 Orang	50,521,000.00	50,521,000.00	25,281,500.00	-25,239,500.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Orang	8 Orang	1,188,368,000.00	1,188,368,000.00	1,288,368,000.00	100,000,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Laporan	8 Laporan	59,901,000.00	59,901,000.00	28,076,000.00	-31,825,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas	21.74 %	21.74 %	891,870,000.00	891,870,000.00	1,030,410,200.00	-506,870,000.00										0.00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan Ormas	21.6 %	21.6 %	891,870,000.00	891,870,000.00	1,030,410,200.00	523,540,200.00										0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	165 Orang	165 Orang	42,350,000.00	42,350,000.00	31,040,000.00	-11,310,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	8	9	10	11				12	NASIONAL			DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	9 Orang	450,000,000.00	835,000,000.00	990,000,000.00	540,000,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	26 Laporan	14,520,000.00	14,520,000.00	9,370,200.00	-5,149,800.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	77 %	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	-325,000,000.00												0.00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan	24.6 %	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	0.00												0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Orang	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	0.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi	5 Kali	2,521,481,700.00	2,061,481,700.00	2,049,111,200.00	-2,521,481,700.00												0.00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham cegah deteksi dini penanganan konflik sosial	21.1 %	2,521,481,700.00	2,061,481,700.00	2,049,111,200.00	-472,370,500.00												0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							PAGU INDIKATIF (Rp)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		Bertambah/ Berkurang (10-12)	13	14	15		16	17		18	19	20	
							TARGET 2025 SEBELUM	RIKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL			DAERAH													
							8	9	10	11	12			13	14												15
1	8.01.06.2.01.0003	3	4	5	6	7	516 Orang	516 Orang	611,483,000.00	611,483,000.00	606,915,000.00	-4,568,000.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				276 Orang	276 Orang	1,909,998,700.00	1,449,998,700.00	1,442,196,200.00	-467,802,500.00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
			J U M L A H						10,960,664,539.00	11,135,016,556.00	10,598,117,656.00	-362,546,883.00														0.00	

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Sragen Tahun 2025, disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Bakesbangpol tahun 2021-2026. Jika dalam perjalanan waktu terdapat revisi karena adanya prioritas kegiatan sementara terdapat keterbatasan dana atau adanya kebijakan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan tersebut masih mungkin berubah. Namun demikian, dibutuhkan komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan dan staf Bakesbangpol untuk mengupayakan realisasinya pada tahun rencana karena keberhasilan kinerja Bakesbangpol ditentukan oleh hal tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Sutomo No. 10 Telp/Fax. 0271 891432 Kode Pos 57213
Website : kesbangpol sragen.go.id Email : kesbangpolsragen@gmail.com
SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.7.2/554/026/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Tahun 2025;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

- KETIGA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
1. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen: rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Perubahan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 2. menyampaikan dokumen perubahan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebagaimana poin 1 kepada Tim Teknis verifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. menindaklanjuti hasil verifikasi pada poin 2, sebelum dilakukan pengesahan Bupati.
- KEEMPAT : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 24 Juli 2025

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SRAGEN,



Drs. SUTRISNA, M.Si

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kab. Sragen;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.7.2/554/026/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Sutrisna, M.Si	Kepala Badan	Ketua
2.	Suprpto, SE, M.Si	Plt. Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Mike Dewi Yuni Astuti, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Andianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ivan Cahya Tri Hantoro, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
KELOMPOK KERJA I :			
1.	Suprpto, SE, M.Si	Kabid. Ideologi Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Ketua
2.	Galih Setyo Nugroho, SSTP.,M.Si	Ka. Subbid Ideologi dan Wasbang	Anggota
3.	Dewi Komalasari, SE	Ka. Subbid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
4.	Imam Rochadi	Pengadministrasi Umum Ideologi dan Wasbang	Anggota
5.	Danang Ari Widyono	Pengadministrasi Umum Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
KELOMPOK KERJA II:			
1.	Tri Darsono, S.Sos.,MM	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketua
2.	Kumaedi Thohir, S.IP	Ka. Subbid. Politik Dalam Negeri	Anggota
3.	Budi Sutrisno, S.Sos	Ka. Subbid. Organisasi Kemasyarakatan	
4.	Hasan Rifai	Penelaah Teknis Kebijakan	
5.	Zainul Arifin, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	
6.	Oktivita Pramita Putri, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	
7.	Tulus Prabowo	Pengadministrasi Umum Organisasi Kemasyarakatan	

1	2	3	4
1	KELOMPOK KERJA III : Tri Darsono, S.Sos.,MM	Plt. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Ketua
2	Ade Kusuma Wijaya, ST	Ka. Subbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
3	Drs. Sri Wahyudi	Ka. Subbid Penanganan Konflik	Anggota
4.	Yusuf Drajat Pratama, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Suradi, SE.,MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Drajat Tri Handono, S.Sos	Penyuluh Keamanan Masyarakat	Anggota
7.	Yuniati Triningsih	Pengadministrasi Umum Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SRAGEN



Drs. SUTRISNA, M.Si